

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Daftar Isi	iii
Abstraksi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
1. Tindak Pidana Korupsi	13
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	14
3. Pemerasan	16
4. Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)	16
F. Kerangka Teoritis	18
1. Teori Penegakan Hukum.....	20
2. Teori Sistem Hukum (<i>Legal System Theory</i>)	26
3. Korupsi menurut Pandangan Islam.....	28
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan.....	31
2. Spesifikasi Penelitian.....	31
3. Jenis dan Sumber Data.....	32
a. Data Primer.....	32
b. Data Sekunder	32
4. Metode Pengumpulan Data	34
a. Dokumentasi.....	34

b. Observasi.....	35
c. Wawancara	35
5. Lokasi Penelitian	36
6. Metode Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Penegakan Hukum.....	39
1. Komponen Sistem Hukum Pidana.....	41
a. Komponen Instrumental.....	41
b. Komponen Kelembagaan (Institutional)	46
c. Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum	48
d. Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan	48
e. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi	49
B. Tindak Pidana Korupsi	50
1. Tindak Pidana.....	50
2. Pidana Korupsi	51
C. Pungutan Liar	80
D. Operasi Tangkap Tangan	83
E. Hukum Pendaftaran Tanah	89
F. Korupsi menurut Pandangan Islam	90
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali	93
1. Perspektif Substansi Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali	107
2. Perspektif Struktur Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali	117

3.	Perspektif Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali	132
B.	Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali	136
1.	<i>Legal Substance</i>	136
2.	<i>Legal Structure</i>	137
3.	<i>Legal Culture</i>	139
C.	Penegakan Hukum ke Depan yang Diperlukan untuk Mengurangi Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Boyolali	140
1.	Aspek <i>Legal Substance</i> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan dalam Jabatan	142
2.	Aspek <i>Legal Structure</i> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan dalam Jabatan	146
3.	Aspek <i>Legal Culture</i> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan dalam Jabatan	149
BAB IV	PENUTUP	154
A.	Simpulan	154
B.	Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157